



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 30 April 2020

Halaman: 2

Pastikan Warga Tak Dapat Dobel Bantuan

Sebanyak 38,3 Persen KK Perolehan Bansos

JOGJA, Radar Jogja - Sebanyak 53.319 kepala keluarga (KK) atau 38,3 persen KK di Kota Jogja akan menerima skema bantuan sosial (Bansos). Sinkronisasi data menjadi persoalan untuk memastikan tidak ada warga yang menerima dobel bantuan dari pemerintah.

Para KK tersebut tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, dan data keluarga sasaran jaring pengaman sosial (KSJPS) milik Pemkot Jogja, serta terdampak covid 19. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, tahap yang paling lama adalah mensinkronkan data kemensos dan data Pemkot Jogja. "Artinya ada warga yang dapat bertumpuk-tumpuk, bisa dua, tiga atau empat program, jika tidak kami saring," tutur HP kemarin (28/4).

HP menambahkan, ada bermacam bantuan yang akan diberikan. Mulai dari Rp 200.000 per bulan. Diberikan selama sembilan bulan untuk non program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Sedangkan penerima PKH dan BPNT diberikan selama setahun. Ada bantuan langsung tunai yang Rp 600.000 per bulan tapi hanya tiga bulan. Itu skema Kemensos, yang jumlahnya 36.600 KK," kata HP.

Bantuan dari Pemkot, lanjut HP, diberikan pada yang terdata dalam

KSJPS atau yang dikenal dengan kartu menuju sejahtera (KMS) dan yang terdampak lainnya di luar DTKS. Atau DTKS yang belum mendapat program apapun. "Itu yg akan di bantu melalui APBD Pemkot Jogja, jumlahnya 16.719 KK," ungkapnya.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja itu menambahkan, data PKH dan BPNT milik kemensos didasarkan pada NIK ibu atau isteri. Sementara data induk Kota Jogja termasuk dalam KSJPS adalah berdasarkan kepada KK. "Di tingkat pemkot kemarin tingkat duplikasinya sangat rendah. Untuk lebih bisa meyakinkan, minggu ini

divalidasi dan verifikasi tingkat kelurahan," ungkapnya.

Mantan wartawan itu menambahkan, saat ini juga disibukkan untuk mengolah data dari perusahaan yang melaporkan karyawan yang dirumahkan atau di-PHK. Menurut dia, saat ini sudah ada 204 perusahaan yang melaporkan 7.108 karyawan dirumahkan dan yang di-PHK 173 orang. Dia berharap proses pendataan akan segera terealisasi. Sehingga proses penyaluran juga semakin cepat sembari menunggu arahan dari provinsi atau pusat. "Rencananya April, Mei, Juni akan kami berikan," tutur HP. (crl/pr/zl)



Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Segera ☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Biasa ☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005